



ISBN 978-979-26-8577-0



9 789792 685770

Penerbit:  
**LaksBang PRESSindo Yogyakarta**  
Member of Laksbang Group  
Email: [laksbangyk@yahoo.com](mailto:laksbangyk@yahoo.com)

bekerjasama  
dengan

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**  
Jl. PB Sudirman No 07 | Phone : (0338) 67191  
Email : [unars\\_situbondo@yahoo.com](mailto:unars_situbondo@yahoo.com)  
Website: <http://unars.ac.id>

**PROCEEDING**

Blue Economy In The Pacific Rim In 21st Century  
Challenges and Opportunities

# PROCEEDING

BLUE ECONOMY IN THE PACIFIC RIM IN 21<sup>ST</sup> CENTURY  
*Challenges and Opportunities*



## Oceanic International Seminar

April 26-27, 2013  
University of Abdurachman Saleh  
Situbondo, Indonesia



**PROCEEDING**  
**Blue Economy in The Pacific Rim in 21<sup>st</sup> Century**  
***Challenges and Opportunities***

**Oceanic International Seminar**

**PROCEEDING**  
**Blue Economy in The Pacific Rim in 21<sup>st</sup> Century**  
***Challenges and Opportunities***

**Oceanic International Seminar**

**Editor:**  
**Dr. Sukidin, M.Pd**



bekerjasama



**PROCEEDING**  
**BLUE ECONOMY IN THE PACIFIC RIM IN 21ST CENTURY**  
**CHALLENGES AND OPPORTUNITIES**

Editor:  
Dr. Sukidin, M.Pd

First Published, July 2014

Published by:  
**LaksBang PRESSindo Yogyakarta**  
Member of Laksbang Group  
Email: laksbangyk@yahoo.com  
Cooperation with  
**UNIVERSITY OF ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**  
Jl. PB Sudirman No 07 | Phone : (0338) 67191  
Email : unars\_situbondo@yahoo.com  
Website: <http://unars.ac.id>

**IKAPI No. 129/JTI/2011**

**ISBN: 978-979-26-8577-0**

# CONTENTS

<b>THE MANAGEMENT OF MANGROVE FOREST IN SITUBONDO, EAST JAVA INDONESIA</b>	
Ir. Endang Suhesti, MP and Dian Maya Kurnia, M.Pd .....	1
<b>A PRELIMINARY SYSTEM DYNAMICS-GAME MODEL OF BLUE COASTAL MANAGEMENT: A case study of Madura Strait</b>	
Daniel Mohammad Rosyid .....	11
<b>THE IMPACT OF COASTAL EROSION AND SEAWATER INTRUSION TO THE DECLINE IN AGRICULTURAL OUTPUT</b>	
Y. Suryaningsih .....	21
<b>THE INDONESIAN LEGAL POLITICS IN REGIONAL MARINE AREA MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION IN SITUBONDO</b>	
Winasis Yulianto SH., M.Hum & Dian Maya Kurnia, S.Pd, M.Pd ....	29
<b>THE EMPOWERMENT OF ECONOMIC SOCIETY THROUGH THE GROUPING SEAWEED FARMERS IN GELUNG BEACH</b>	
Sulistyaningsih .....	61
<b>MANGROVE DEFORESTATION AS A TRIGGER OF THE PREDISPOSI- TION PLANT PATHOGEN DEVELOPMENT</b>	
R. Suryantini .....	75

**MULTIHULL CONCEPT FOR ENERGY SAVING AND  
REDUCE POLLUTION**

Richard B Luhulima and I K A P Utama ..... 89

**FURTHER STUDY INTO THE DEVELOPMENT OF HYBRID CATAMA-  
RAN FISHING VESSEL**

Pramudya Imawan Santosa and I Ketut Aria Pria Utama ..... 103

**POTENTIAL ECONOMIC REGION OF EKS DISTRICT BESUKI AND  
REVITALIZATION PANARUKAN PORT ACTIVITY AS INTERNATIONAL  
TRADE CENTER**

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SE., MSc. .... 121

**STUDY OF FLUID FLOW CHARACTERISTIC AROUND ROUNDED-  
SHAPE FPSO USING RANS METHOD**

Mufti Fathonah Muvariz and Jaswar Koto ..... 131

**DEVELOPMENT OF MARINE AND EMPOWERMENT COASTAL  
COMMUNITIES**

Dr. Ir. H. Supartono, MM ..... 159

**FEASIBILITY STUDY OF WIN-IN-GROUND FOR RESCUE OPERATION  
IN KEPULAUAN RIAU**

E.Prayetno, Jaswar. Kand A.S.A. Kader ..... 173

**A PRELIMINARY SYSTEM DYNAMICS-GAME MODEL OF BLUE  
COASTAL MANAGEMENT: A case study of Madura Strait**

Daniel Mohammad Rosyid ..... 191

**ROLE OF BRACKISHWATER AQUACULTURE DEVELOPMENT CEN-  
TER (BADDC) SITUBONDO IN SUPPORTING INDUSTRIALIZATION  
BASED ON BLUE ECONOMY CONCEPT**

Ir. Dwi Soeharmanto, MM. .... 201

**THE INDONESIAN LEGAL POLITICS IN REGIONAL MARINE AREA  
MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION IN SITUBONDO**

Winasis Yulianto SH., M.Hum ..... 211

**LARGE OFFSHORE REMOTE TERMINAL- FIRST STEP TOWARDS  
OFFSHORE COMMUNITY SETTLEMENT**

Mohd Zamani, Mohammad Rosyid. Koto. Sunarsih, Azman ..... 223

**SUSTAINABLE FISHERIES BASED ECONOMY AND MANAGEMENT  
IN THAILAND: a Challenge**

Suriyan Tunkijjanukij ..... 243

**PENDEKATAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP)**

Dr. Sukidin, MPd., Prof. Dr. Bambang Hari Purnomo, MA.,  
Drs. Pudjo Suharso, MSi ..... 257

**IDENTIFICATION AND MONITORING OF SPECIES AND CORAL  
REEFS IN THE SITUBONDO REGENCY**

Drs Edy Kusnadi Hm, M.Si., Drs Akhmad Yulianto. M.Si and  
Roi Hidayat, S,Pi, M.Si ..... 269

**THE CAUSE FACTOR OF OVER CARRYING CAPACITY IN SOFT SHELL  
CRAB POND AT PEMALANG REGENCY – CENTRAL JAVA**

Muhamad Agus, Johanes H, YS Darmanto, S. Budi Prayitno ..... 283

**STUDY OF MANGROVE DEGRADATION AND COASTAL EROSION IN  
BREBES REGENCY, CENTRAL JAVA**

Ir. Suyono, M.PI. .... 297

# **PENDEKATAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)**

**Dr. Sukidin, MPd**

**Prof. Dr. Bambang Hari Purnomo, MA**

**Drs. Pudjo Suharso, MSi**

Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo

## **A. PENDAHULUAN**

Dilihat dari sudut kewilayahan, Indonesia terdiri dari darat dan lautan. Namun wilayah kelautan jauh lebih besar ketimbang wilayah daratan. Data yang ada menyebutkan bahwa 76 % wilayah kelautan di mana 0,3 juta km persegi berupa laut teritorial/perairan pantai dan 2,8 juta km persegi berupa laut nusantara.

Dari berbagai studi yang ada (Undip, 2000; Unri 2001) digambarkan bahwa potensi laut yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik dieksplorasi sumber daya hewani berupa ikan maupun direkayasa untuk pantai-pantai tujuan wisata nomor satu di Asia. Ketidakmampuan mengeksplorasi sumber daya

kelautan menjadikan kekayaan laut yang sangat besar tidak dapat dimanfaatkan secara baik khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Gambaran masyarakat pesisir yang kaya, makmur dan sejahtera masih jauh dari kenyataan. Kenyataan yang ada adalah gambaran masyarakat pesisir dan nelayan yang miskin, kumuh dan tak berdaya (Nasikun, 2000; Unri, 2001).

Akumulasi pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai penelitian menyajikan paling sedikit dua kesimpulan para ahli berikut tentang program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir khususnya yang tergolong masyarakat pesisir miskin melalui upaya-upaya pengembangan (*empowering*).

*Pertama*, bahwa salah satu kelemahan paling penting dari kebanyakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir adalah kecenderungan kuat untuk menurunkan logika dasar dan substansi program-program itu dari suatu “monisme” atau ketunggalan pendekatan teoretis tertentu; bahwa keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dapat dilakukan melalui aplikasi tunggal pendekatan teknologis atau pendekatan ekonomi.

*Kedua*, bahwa keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir sebaliknya sangat bergantung pada sejauh mana ia berhasil mengintegrasikan kedua pendekatan itu melalui pengembangan “dinamika kelompok” (*group dynamic*) dan “dinamika masyarakat” (*community dynamic*) sebagai wahana aktualisasi dan sinergi keduanya.

Dalam berbagai hasil penelitian (Nasikun dkk, 2000) ditemukan bahwa pendekatan tunggal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang miskin khususnya nelayan tidak dapat berjalan optimal. Sebaliknya pendekatan sinergis memberikan hasil yang optimal.

Kegagalan pendekatan tunggal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir tidak lepas dari perspektif

yang memandang bahwa kemiskinan adalah semata-mata persoalan individu; persoalan ekonomi ataupun persoalan ketidakmampuan teknologis masyarakat di dalam mengembangkan kehidupannya ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan masyarakat pesisir harusnya dipandang sebagai fenomena yang multifaset tidak saja mencakup aras individual tetapi juga mencakup aras struktural dan kultural. Kemiskinan masyarakat pesisir tidak hanya masalah ketidakmampuan individu, khususnya para nelayan, tetapi juga masalah alam lingkungan, organisasi dan sangat mungkin karena kesalahan dari berbagai aplikasi kebijakan di bidang kelautan atau kebijakan kenelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir melalui upaya pengembangan tentu tidak dapat hanya melalui instrumen penguatan ekonomi, tetapi juga harus ditempuh melalui berbagai dimensi yang terkait. Dengan kata lain proses pengembangan masyarakat miskin pesisir hendaknya dibangun dalam kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Dengan langkah ini diharapkan tidak saja akan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pesisir untuk pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Tetapi juga akan dapat lebih menjamin kesinambungan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Masalahnya tidak semua masyarakat miskin pesisir tidak saja memahami kesemuanya itu, tetapi juga tidak mengerti harus berbuat apa dengan kehidupan yang tengah dijalani. Masyarakat pesisir kebanyakan tidak mampu secara optimal memberdayakan diri tidak saja karena menghadapi kendala kelautan tetapi juga masalah

permodalan, pemasaran produk, manajemen organisasi, masalah-masalah sosial dan faktor-faktor teknis lainnya.

Dengan karakteristik masyarakat miskin pesisir maka upaya pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan tentulah tidak dapat dilakukan hanya menitikberatkan pada optimalisasi laut, tetapi juga bagaimana upaya untuk mengoptimalkan lahan pesisir. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bentuk kesatuan kegiatan ekonomi yang dapat menggabungkan antara aktivitas ekonomi laut dengan aktivitas ekonomi pertanian pesisir sehingga masyarakat miskin di pesisir mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteranaanya.

## **B. VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP).**

Pemikiran yang diungkapkan penulis didasarkan pada visi yang hendak dibangun, yakni : **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara lestari.**

Sedangkan **misi** yang hendak diwujudkan adalah *tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, lestari, berkelanjutan dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai lembaga swasta dan pemerintah.*

Visi dan misi yang akan dibangun ini didasarkan pada arah paradigma baru pembangunan masyarakat pesisir di mana masyarakat pesisir tidak lagi dijadikan obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan yang mandiri, maju, partisipatif, demokratis dan trampil dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara lestari dan berkesinambungan.

### C. KONSEPTUALISASI PEMP

Secara konseptual pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran harus dilakukan secara komprehensif, holistik dan kontinyu. Dalam arti ini maka program, kegiatan dan langkah-langkah yang diambil dalam PEMP harus mencakup berbagai aras : ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dengan berbasis pada partisipasi dan kreativitas masyarakat.

Program PEMP akan dapat dikatakan berhasil apabila tidak saja mampu meningkatkan kemakmuran ekonomi tetapi juga menjamin terselenggaranya kesejahteraan hidup. Ini artinya keberhasilan program PEMP tidak saja dapat dilihat dari semakin meningkatnya kehidupan masyarakat pesisir, tetapi juga masyarakat dapat secara mandiri mengembangkan potensi dirinya dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan partisipasi, kebutuhan akan pendidikan dan kebutuhan akan rasa nyaman serta dapat memenuhi kebutuhan *innatura* lainnya seperti keberagaman dan sebagainya.

Keberhasilan program PEMP dalam meningkatkan pendapatan tentu akan memberikan daya tahan ekonomi rumah tangga yang lebih tinggi sehingga masyarakat pesisir akan lebih kuat menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Namun keberhasilan di bidang ekonomi ini belumlah cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bukanlah sekedar aspek ekonomi, namun lebih dari itu. Keberhasilan ekonomi hanyalah sebagai *necessary condition*, namun belumlah menjadi *sufficient condition* bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu keberhasilan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan bidang lain : sosial; termasuk pendidikan, agama dan aspek-aspek sosial lainnya. Hal ini penting dilakukan bersamaan dalam kegiatan PEMP karena kegiatan tersebut akan dapat dijadikan

basis bagi pembentukan kualitas sumber daya manusia yang “mumpuni”. Kualitas SDM sangat penting karena ia merupakan kunci bagi kesuksesan pelaksanaan program di masa mendatang. Kualitas SDM juga sangat diperlukan karena berkaitan dengan penguasaan teknologi. Dengan penguasaan teknologi yang memadai maka transformasi dan aplikasi teknologi budidaya laut dan penciptaan masyarakat pesisir atas dasar “pendekatan kultur” akan dapat dilakukan yang pada akhirnya juga dapat dijadikan instrumen bagi peningkatan produktivitas ekonomi, yang berarti peningkatan ekonomi rumah tangga.

Dalam aplikasi dan implementasi program PEMP, faktor budaya juga harus diperhatikan dan dijadikan bidang garapan. Faktor budaya ini penting diperhatikan agar masyarakat pesisir mempunyai etos kerja yang tinggi, mampu bekerja keras dan mempunyai budaya kerja sehingga mereka tidak pasrah menggantungkan hidupnya pada alam (laut) menerima nasib apa adanya.

Di samping itu harus diperhatikan bahwa upaya memberdayakan masyarakat pesisir harus pula memperhatikan masalah lingkungan. Faktor lingkungan penting diperhatikan terutama agar kelestarian laut dan sumber-sumber laut dapat dijamin sehingga prinsip kesinambungan pembangunan dapat terjaga. Apabila eksploitasi sumber-sumber laut untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak diperhatikan, maka suatu ketika akan terjadi pengrusakan lingkungan yang pada akhirnya membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Di atas semua itu peran pemerintah nampaknya tidak dapat ditinggalkan. Sebagai fasilitator dan penyedia sarana pendukung masih sangat dibutuhkan. Demikian pula berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran dan sebagainya masih sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi program PEMP menuntut berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam

berbagai kegiatan. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa kegiatan dan implementasi PEMP harus memperhatikan prinsip : ekonomi *viable*; sosial-budaya *empowering*; lingkungan *sustainable* dan politik *partisipatif*.

#### **D. PENDEKATAN SOSIAL PROGRAM PEMP**

Dengan konseptualisasi program PEMP yang komprehensif, holistik dan kontinyu yang mencakup berbagai dimensi : ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, maka pengembangan program PEMP pun menuntut pendekatan yang dapat mencakup berbagai dimensi tersebut. Dengan kata lain pendekatan PEMP tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan pendekatan tunggal atau “monoisme”.

Dalam pengembangan program PEMP ini pendekatan sosial yang dapat dipergunakan adalah :

- 1. Pendekatan partisipatif.** Sebagaimana dikatakan dalam uraian sebelumnya, implementasi program PEMP harus memperhatikan prinsip politis yang berarti harus mendorong terciptanya partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penikmatan hasil-hasilnya. Prinsip ini secara politis sangat penting karena akan membentuk semacam *political efficacy* sehingga masyarakat secara sukarela mau terlibat dan bertanggungjawab terhadap apa yang akan dilakukan. Lebih dari itu pendekatan partisipatif sangat penting dilakukan untuk membangun *broad based participatory* sehingga pembangunan yang berparadigma *people centered development* dapat diwujudkan.
- 2. Pendekatan kemitraan.** Pendekatan ini dilakukan untuk menyatukan persepsi sekaligus langkah antara masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga elemen ini harus berjalan sinergis karena upaya pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan satu unsur: pemerintah saja; masyarakat saja;

ataupun swasta saja. Pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat dan swasta karena pertama-tama dan terutama yang akan melaksanakan dan menanggung risiko dari program itu adalah masyarakat. Demikian pula masyarakat masih memerlukan pemerintah yang dapat berperan sebagai fasilitator dan penyedia daya dukung lainnya. Swasta pun ikut terlibat di dalamnya karena masyarakat dan pemerintah tidak dapat memenuhi segala kebutuhan yang mungkin tidak tersedia oleh kedua unsur tersebut. Kebutuhan akan perahu, alat tangkap ikan dan mesin tempel perahu misalnya, jelas memerlukan keterlibatan swasta untuk menyediakannya. Dengan uraian di atas dapat dikatakan betapa ketiga elemen itu harus dapat membangun kemitraan tanpa ada satupun memegang dominasi. Dengan pendekatan kemitraan, satu sama lain mempunyai kedudukan yang setara, saling membutuhkan, saling bergantung dan saling membantu.

- 3. Pendekatan keswadayaan.** Seperti dikatakan dalam pendekatan sebelumnya, bahwa untuk pengembangan program PEMP memerlukan pendekatan kemitraan. Namun perlu diperhatikan pendekatan kemitraan tidak harus menghilangkan aspek kemandirian atau keswadayaan masyarakat. Konsep kemandirian atau keswadayaan masyarakat tidak berarti masyarakat tidak membutuhkan elemen lain, namun harus diartikan bahwa pendekatan ini semata-mata dipergunakan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi sekaligus melakukan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensinya.
- 4. Pendekatan kelembagaan.** Aspek yang seringkali menjadi kendala atau *constrain* dalam upaya memberdayakan masyarakat adalah ketiadaan kelembagaan yang *empowering*. Banyak kelembagaan yang sifatnya eksploitatif sehingga keberadaan lembaga itu tidak membantu masyarakat tetapi justru malah merugikan. Pendekatan kelembagaan ini penting dilakukan untuk mengelola

dinamika kelompok (*group dynamic*) yang ada di masyarakat dengan beragam kepentingan. Dengan pendekatan kelembagaan maka ada dua hal penting bisa dicapai : (a) berbagai kepentingan individual yang sangat beragam dapat diwadahi dan dikanalisis sehingga meminimalkan konflik di masyarakat; dan (2) memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga lebih mudah membangun jaringan kerja sama untuk kepentingan pengembangan program PEMP.

Suatu kebijakan publik akan memperoleh hasil yang optimal, efisien dan efektif serta disertai prinsip transparan dan akuntabilitas adalah apabila kebijakan publik yang dilakukan dalam kerangka pembangunan tersebut mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini mempunyai makna bahwa masyarakat terlibat mulai dari perencanaan hingga penikmatan hasil pembangunan.

Untuk mendorong masyarakat terlibat secara aktif dan agar kebijakan publik itu memperoleh hasil yang optimal maka kegiatan program sosialisasi kebijakan publik menjadi prasyarat penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain sosialisasi merupakan langkah penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai kebijakan publik yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan meluas, kemungkinan adanya kesalahan komunikasi dan kesalahan persepsi akan dapat dihindarkan sehingga semua pihak dapat menerima kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.

Demikian pula dengan dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat pesisir dengan melalui kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Sosialisasi program PEMP ini sangat penting dilakukan agar berbagai program pengentasan kemiskinan tidak mengalami berbagai kendala atau kegagalan seperti pada program-program pengentasan kemiskinan di masa-masa yang lalu.

## **E. POLA KEMITRAAN**

Salah satu pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan program PEMP adalah dipergunakannya pendekatan kemitraan. Pendekatan ini dilakukan untuk menyatukan persepsi sekaligus langkah antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pengembangan kegiatan PEMP.

Ketiga elemen ini harus berjalan sinergis karena upaya pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan satu unsur: pemerintah saja; masyarakat saja, ataupun swasta saja. Pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat dan kehadiran swasta karena pertama-tama dan terutama yang akan melaksanakan dan menanggung risiko dari pelaksanaan program PEMP ini adalah masyarakat.

Demikian pula masyarakat masih memerlukan pemerintah yang dapat berperan sebagai fasilitator dan penyedia daya dukung lainnya. Pihak swasta pun juga terlibat di dalamnya karena masyarakat dan pemerintah tidak dapat memenuhi segala kebutuhan yang mungkin tidak tersedia oleh kedua unsure tersebut. Kebutuhan akan perahu, alat tangkap ikan dan mesin tempel perahu misalnya, jelas memerlukan keterlibatan swasta untuk menyediakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan betapa ketiga elemen itu harus dapat membangun kemitraan tanpa ada satupun yang memegang peran dominan. Pendekatan kemitraan menempatkan satu sama lain dalam posisi yang setara, saling membutuhkan, saling bergantung dan saling membantu.

## **F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKONOMI**

Setidaknya terdapat 4 hal manfaat dan fungsi yang hendak dicapai dari kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat pesisir.

*Pertama*, mengingat program PEMP merupakan program baru dan pertama kali dilakukan di Kecamatan Girisubo dengan pola pemanfaatan partisipasi masyarakat. Karena merupakan program baru maka pembinaan dan pengendalian kegiatan ekonomi sangat perlu penelitian dari lembaga yang lebih memahami sehingga program kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

*Kedua*, pengelolaan kegiatan ekonomi yang berbasis pada partisipasi masyarakat pada umumnya berjalan bertele-tele dan banyak kepentingan sehingga seringkali menimbulkan konflik. Agar kegiatan ekonomi produktif program PEMP ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta tepat waktu sangat perlu dilakukan pembinaan. Lebih-lebih apabila diingat latar belakang kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat rendah sehingga sangat perlu penelitian. Pengawasan dilakukan agar kegiatan ekonomi ini tidak hanya menguntungkan satu kelompok atau satu pihak saja.

*Ketiga*, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan agar kegiatan ekonomi itu terfokus pada potensi daerah dan cocok untuk dilakukan oleh masyarakat yang berada di pesisir.

*Keempat*, pembinaan dan pengawasan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukkan sehingga terpupuk rasa untuk lebih dapat memajukan masyarakat dan ekonomi wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anton, Leonard, 2005, *Revolusi Biru dan Nelayan di Pesisir Jawa*, Jakarta UI Press.

Nasikun, 2000, *Negara dan Nelayan : Proses Adopsi Organisasi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta, UGM Press.

Pudjo Suharso, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Hinterland Batam*, Batam, Universitas Batam Press.

Robert, John A, 2000, *The Social Impact of Blue Revolution*, London, Sage Publications